

dilakukan jelang akhir tahun. “Jangan sampai yang kemarin saya sampaikan, November masih ada 31 triliun dalam proses e-Tendering²,” imbuhnya.

Dia menjelaskan, belanja barang pemerintah memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian. Dengan belanja di awal tahun, maka APBN bisa menjadi trigger³ pertumbuhan ekonomi lebih awal. Meski demikian, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menggaris bawahi agar penggunaan anggaran tidak hanya fokus pada realisasi. Namun juga harus mempertimbangkan efektifitasnya. “Karena dulu bangga kalau realisasinya 99 persen atau 100 persen. Tapi rakyat dapat manfaat atau tidak dari belanja itu,” kata Jokowi. Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan, efektifitas penggunaan anggaran yang disampaikan Presiden Jokowi merupakan tantangan bagi menteri dan pemda. Meski penyerapan yang banyak disorot, namun Sri sepakat jika efektifitas ataupun output dari penggunaan anggaran harus jelas. “Penekannya tidak hanya menyerap anggaran tapi betul-betul menghasilkan dampak bagi perekonomian dan masyarakat,” kata dia di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta. Sementara terkait percepatan penggunaan Dana, di tingkat pusat sendiri ada sejumlah program yang bisa dilaksanakan langsung di awal tahun. Yakni program yang sifatnya jaminan sosial seperti Program Keluarga Harapan, bantuan sosial, atau program kartu sakti yang dicanangkan Presiden. “Karena tidak memerlukan apa yang disebut procurement⁴,” imbuhnya.

Hal itu berbeda dengan belanja yang sifatnya fisik yang prosesnya relatif membutuhkan waktu. Namun, Sri menilai pembangunan fisik juga bisa dilakukan cepat jika dokumen-dokumen untuk keperluan procurement bisa diselesaikan lebih dini. “Sehingga Januari bisa dijalankan,” kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu. Dalam tempat terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, APBN diyakini sebagai instrumen fiskal⁵ yang akan digunakan untuk menghadapi ancaman perlambatan ekonomi global. Dengan begitu, dia optimis perlambatan ekonomi global tidak berdampak buruk bagi perekonomian nasional.

Sebab, tekanan eksternal tersebut dapat mempengaruhi perekonomian domestik. Dampak tersebut bahkan sudah terlihat dari kegiatan ekonomi di beberapa sektor riil di Indonesia yang sudah mengalami perlambatan. “Ini terlihat dari penerimaan perpajakan dari sektor korporasi yang mengalami pelemahan,” jelasnya. Dia mengakui hingga akhir 2019 dan tahun 2020, ekonomi diprediksi makin susah. Pemerintah pun mengambil kebijakan penyeimbang atau *countercyclical* dengan jalan menaikkan belanja di APBN dan memberikan insentif perpajakan untuk menghadapi dampak perlambatan dan ketidakpastian ekonomi.

Dengan meningkatnya belanja negara dan berkurangnya pendapatan akibat insentif perpajakan, Ani memprediksi defisit anggaran akan melebar dari 1,84 persen menjadi 2,2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2019.

Dengan kebijakan *countercyclical*, mantan *Managing Director of World Bank* itu optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa terjaga di level 5 persen, di saat ekonomi negara dunia mengalami tekanan. “Kita

harap langkah untuk meningkatkan defisit dapat jaga laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dijaga di atas 5 persen,” tambahnya. Selain berperan menjaga pertumbuhan ekonomi, belanja negara dalam APBN⁶ juga diarahkan mampu mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan (Gini Ratio). Sementara pada tahun 2020, APBN akan mulai difokuskan untuk mendukung pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan kebijakan dan regulasi, transformasi ekonomi, dan penyederhanaan birokrasi. (far/lyn/JPG/r6)

Catatan

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Kementerian Negara/Lembaga dan disahkan oleh Dirjen Perbendaharaan atau Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). [vide: http://www.wikiapbn.org/daftar-isian-pelaksanaan-anggaran/#to-pmk_164]

DIPA berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.[vide: *Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2012 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Tanda Tangan Elektronik pada Arsip Data Komputer Surat Perintah Membayar*]

DIPA berlaku untuk satu tahun anggaran dan memuat informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Selain itu, DIPA berfungsi sebagai alat pengendali, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, dan sekaligus merupakan perangkat akuntansi pemerintah. Pagu dalam DIPA merupakan batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.[Vide: http://www.wikiapbn.org/daftar-isian-pelaksanaan-anggaran/#to-pmk_164]

Sumber Berita

1. <https://www.lombokpost.net/2019/11/15/gubernur-terima-dipa-dan-dana-transfer-dari-presiden/15/11/2019>;
2. <https://radarlombok.co.id/gubernur-terima-dipa-dan-tkdd-dari-presiden.html/15/11/2019>

End Note/ Catatan Akhir

¹ Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran [vide: psl 1 angka 2, PMK 160/PMK.02/2012]

² E-Tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan [vide: <http://www.bralink.id/e-tendering/>]

³ Trigger: pelatuk [vide: <https://translate.google.com/#view=home&op=translate&sl=en&tl=id&text=trigger>]

⁴ Procurement adalah pembelian [vide: <https://translate.google.com/#view=home&op=translate&sl=en&tl=id&text=procurement>]

⁵ fiskal/fis·kal/ a berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara [vide: <https://kbbi.web.id/fiskal>]

⁶ Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang. [vide: psl 1 angka 3 PP 12/2019]